

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di sub-bab ini, penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu yang berguna sebagai rujukan dan penambah referensi penelitian. Penelitian terdahulu pertama memiliki pembahasan yang linear dengan penulis, namun menciptakan *novelty* yang berbeda; penelitian terdahulu kedua membahas tentang hal apa saja yang terjadi setelah kasusnya selesai, utamanya dari segi penurunan kepercayaan masyarakat; sedangkan penelitian terdahulu ketiga membahas alasan atau motif AS melakukan penangkapan terhadap Meng Wanzhou.

1. Penelitian pertama berjudul “Caught Between Giants: Hostage Diplomacy and Negotiation Strategy for Middle Powers” oleh Danielle Gilbert dan Gaëlle Rivard Piché (2021) dalam *Texas National Security Review: Volume 5, Issue 1 (Winter 2021/2022)*, pp. 12-34. Pembahasan mengenai negosiasi sandera, baik yang diambil oleh *non-state actor* seperti kelompok terorisme, atau *state actor* sekalipun, harus lebih ditingkatkan lagi. Bukan hanya dari segi militer, namun segala aspek yang berguna untuk penyelamatan sandera. Peneliti menggunakan teori diplomasi sandera, yang didefinisikan ketika sebuah negara menerapkan sistem peradilanannya untuk menahan orang asing dan menggunakannya sebagai tawanan, guna menjadi pengaruh dalam mengejar tujuan kebijakan luar negeri. Kejadian yang dialami oleh AS, Tiongkok, dan Kanada menjadi investasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penangkapan dan pemulihan sandera. Lebih lanjut, penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana Tiongkok berusaha mengalahkan

kekuatan AS dengan menjalankan praktik diplomasi sandera kepada *middle-power countries* sekutu-sekutu AS, seperti Kanada, Australia, dan Jepang. Maka, jika negara *middle power* ingin melindungi warga negaranya agar tidak menjadi sandera negara lain, mereka harus melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan sistem pertahanan. Namun masalahnya di sini adalah mereka belum bisa menyamai kedudukan AS dan Tiongkok. Jadi mau tidak mau, negara *middle powers* ini harus menjalin hubungan yang baik dengan AS untuk melindungi dirinya sendiri. Alasan digunakannya penelitian ini adalah karena penelitian ini membahas kasus yang sama dengan teori yang linear dengan apa yang dibahas penulis. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas mengenai bagaimana negara *middle power* menjadi target dari diplomasi sandera Tiongkok, dan bagaimana cara mereka menangani ancaman tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang keterkaitan kasus atau mengenai diplomasi sandera dalam perkembangan diplomasi.

2. Penelitian kedua dituliskan dalam *American Journal of International Law*, Volume 116, Issue 1, January 2022, pp. 184-189, dengan judul “Huawei’s Meng Wanzhou Released to China After Entering into Deferred Prosecution Agreement with U.S. Justice Department”. Penelitian ini membahas apa yang terjadi setelah Meng Wanzhou dibebaskan oleh Kanada dan dipulangkan ke Tiongkok. Selain menurunnya relasi antar ketiga negara, persepsi rakyat Kanada terhadap Tiongkok juga menurun sebanyak 86%. Sementara itu, Huawei selaku perusahaan Meng Wanzhou juga dihadapkan pada masalah yang berbeda, yaitu mereka perlu beradaptasi dengan proses

bisnis yang baru sejak dilarangnya penjualan produk Huawei di AS. Alasan diambilnya penelitian ini sebagai penelitian terdahulu yaitu untuk melihat dampak yang dihasilkan dari adanya diplomasi sandera. Perbedaan dengan penelitian penulis, hasil akhir yang ingin disampaikan oleh penulis berbeda dengan apa yang peneliti dalam jurnal sampaikan. Penulis jurnal memfokuskan pembahasan pada *after effect* dan dampak dari adanya kasus ini. Walaupun menciptakan *novelty* yang berbeda, penulis ikut mengambil sumber dari jurnal ini karena masih relevan untuk masuk ke pembahasan.

3. Penelitian ketiga berjudul “Behind the Farce of the Meng Wanzhou (& Huawei’s) Ordeal: Maneuvers in a Hegemonic Duel” oleh James C. Hsiung (2021) dalam *US-China Law Review: Volume 17, No. 2 (February 2020)*, pp. 56-63. Penelitian ini membahas mengenai motif AS melakukan penangkapan terhadap Meng Wanzhou di Vancouver dan alasan mengapa AS dan Kanada sudah memperlakukannya bak seorang yang bersalah, padahal sidang perkara kasusnya belum juga dilakukan. Ada spekulasi bagus mengapa kasus Meng Wanzhou terkait dengan Perang Dagang AS-Tiongkok yang lebih luas, termasuk di dalamnya ketakutan AS jika Tiongkok akan menggantikannya di posisi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Menurut peneliti, selain karena penipuan, ada indikasi AS yang tidak terima dengan kemajuan pesat yang Huawei dan Tiongkok buat dalam pasar teknologi dunia. Akibat rasa *insecure* ini, AS menangkap Meng dan memberlakukan sejumlah sanksi agar sejenak menghentikan dominasi Tiongkok dalam perkembangan teknologinya. Sejak tahun 2007, pertumbuhan perusahaan Huawei sangat meningkat tajam. Bersamaan

dengan kesuksesan Huawei, total defisit perdagangan Amerika di seluruh dunia pada tahun 2018 telah melebar menjadi USD 621 miliar dalam sektor barang dan jasa. Alasan diambilnya penelitian ini terkait dengan pembahasan konflik dan persaingan ekonomi-politik Tiongkok dan AS. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini memiliki *output* dan *novelty* yang berbeda dengan penelitian penulis, tapi terkait dengan alasan dan motif dilakukannya penangkapan Meng Wanzhou oleh AS pada tahun 2018. Karena masih satu pembahasan, maka penulis mengambil referensi dari jurnal ini sebagai tambahan data dalam gambaran umum.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Diplomasi

Praktik diplomasi antar bangsa sebagaimana yang dituliskan Henry Kissinger untuk diplomasi di abad ke-20 beranggapan bahwa, tidak ada negara yang memainkan Hubungan Internasional yang tegas dan tidak tegas di waktu bersamaan selain AS. Tidak ada *society* yang memaksakan ideologi atau hubungan dalam negerinya kepada aktor lain seakan hal tersebut dapat diterapkan secara universal. Tidak ada bangsa yang lebih enggan untuk menggantungkan dirinya sendiri, bahkan ketika mereka dihadapkan pada situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Seiring dengan kemajuan dan dominasi diplomasi AS di abad ke 20, nampaknya diplomasi AS akan mengalami penurunan di abad 21. Setelah berhasil memenangkan Perang Dingin, beberapa elemen dalam kemajuannya akan menurun, prioritas setiap negara juga bukan lagi soal keamanan, namun kepada hal lain seperti ekonomi, nuklir, serta kerjasama-kerjasama internasional. Ketika

kekuatan AS sudah mulai menurun, maka ada waktunya bagi negara-negara lain untuk melawan kekuatan AS. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa diplomasi di abad ke-21 atau setelah Perang Dingin adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Diplomasi di masa ini dipenuhi oleh kontradiksi, fragmentasi, dan globalisasi.
2. Relasi antar negara akan seperti sistem di Eropa pada abad ke-18 sampai 19.
3. Dunia akan dikuasai oleh enam kekuatan besar; AS, Eropa, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan (mungkin) India.
4. Hubungan Internasional akan berjalan lebih global. Komunikasi dan ekonomi akan berjalan secara simultan. Isu-isu yang muncul hanya akan bisa ditangani secara global, misalnya tentang perjanjian nuklir, lingkungan, ledakan kependudukan, dan kemerdekaan ekonomi.

Meluasnya globalisasi pasca Perang Dingin membawa diplomasi abad 21 ke babak baru yang berbeda dari perkembangan diplomasi yang pernah ada sebelumnya. Diplomasi abad 21 ini tidak hanya mempengaruhi pola interaksi manusia, namun juga menambah daftar panjang kejahatan yang kemungkinan terjadi, termasuk meningkatnya terorisme; fundamentalisme politik dan agama; bencana alam yang meluas akibat perubahan iklim global; dan fenomena globalisasi.¹⁶

Alasan digunakannya teori ini adalah sebagai landasan analisis seluruh pembahasan kasus hubungan internasional antara aktor yang terlibat, berkaca dari makna 'diplomasi' menurut G.R. Berridge dalam bukunya yang berjudul

¹⁵ *Ibid*, hal. 23.

¹⁶ George Kohlrieser. *Hostage at the Table How Leaders Can Overcome Conflict, Influence Others, and Raise Performance*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2006, hal. xix.

Diplomacy: Theory and Practice, diplomasi adalah sebuah kegiatan politik yang bertujuan untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka, tanpa menggunakan kekuatan berarti, propaganda, atau hukum. Makna lain diplomasi berdasarkan buku *Modern Diplomacy* karya R.P. Barston, yaitu berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara dengan negara atau dengan aktor lainnya. Dari perspektif negara sendiri, diplomasi berkaitan erat dengan proses menasihati, membentuk, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, diplomasi adalah cara negara—melalui perwakilan formal atau aktor lainnya—untuk mengartikulasikan, mengoordinasikan, dan mengamankan kepentingan tertentu menggunakan korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, ancaman, dan aktivitas terkait lainnya.

2.2.2 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Konsep kepentingan nasional dalam perspektif realisme selanjutnya akan menjadi sorotan dalam pembahasan seluruh kasus ini, karena pada dasarnya memang semua aktor yang terlibat memiliki konflik kepentingan. Realisme adalah teori yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh penstudi Hubungan Internasional untuk menganalisa hubungan antar aktor. Asumsi dari perspektif realisme adalah bahwa negara melihat dunia sebagai suatu tempat yang anarkis dan amoral, maka sudah sepatutnya negara melindungi dirinya sendiri melalui kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Realisme kemudian berpendapat bahwa sifat anarkis dan amoral yang dipunyai negara adalah karena sifat asli manusia itu sendiri; yang egois, tidak mau kalah, dan selalu curiga

terhadap orang lain, bahwa “... *individual are organised into states, human nature impacts on state behaviour*”.¹⁷

Scott Burchill (2005) menyatakan bahwa realisme berusaha untuk melihat, mendeskripsikan, dan menjelaskan negara dalam politik internasional sebagaimana adanya, bukan melihat seperti apa yang diinginkan. Pendapat lain menurut Morgenthau (1970), tindakan aktor dalam perspektif realisme tidak akan dipengaruhi oleh moral dan legal komitmen, tapi oleh kepentingan dan kekuatan (*power*). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Art and Waltz (1983), bahwa negara-negara yang anarki tidak mengadopsi hukum moral. Kemungkinan perilaku moral bertumpu pada keberadaan pemerintahan efektif yang dapat mencegah dan menghukum tindakan ilegal. “*States often can and do act out of moral concerns [...] either men or states, they never do good unless necessity drives them to it*”.¹⁸

Power yang sebelumnya disebut oleh Morgenthau tidak semata-mata hanya merujuk pada kekuatan militer dalam berperang. Malahan, sejak awal Morgenthau berpendapat bahwa makna “*power*” akan berbeda seiring berjalannya waktu dan situasi; bisa jadi *economic power*, *cultural power*, atau *military power*. Apapun itu, setiap manusia memiliki karakter untuk “*will to power*”, maka secara naluriah, manusia, atau dalam hal ini negara, akan berusaha menempatkan dirinya pada posisi tersebut.¹⁹

¹⁷ Sandrina Antunes dan Isabel Camisão. *Realism: International Relations Theory*. Bristol: E-International Relations Publishing, 2017, hal. 16.

¹⁸ Jack Donnelly. *Realism: Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan. 2000, hal. 48-49.

¹⁹ Scott Burchill. *Realism: The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2005, hal. 36.

Namun ada kalanya ketika kepentingan nasional terbentur dengan kekuatan opini publik masyarakat nasional, internasional, ataupun organisasi internasional, hingga mungkin lebih baik mengalah daripada memperuyam masalah. Pertimbangan lain untuk mencapai kepentingan nasional juga seringkali terbentur dengan adanya hukum domestik dan hukum internasional, walaupun hukum domestik seringkali lebih banyak dilanggar daripada hukum internasional yang isinya penuh dengan kebijakan moral. Setiap pelanggaran hukum pasti membawa kerugian bagi aktor lain, tapi tidak akan ada *political goals* yang dicapai tanpa kerugian.²⁰

Salah satu kasus yang telah turun temurun ada dalam perspektif realis adalah fakta bahwa manusia melakukan penyanderaan. Penyanderaan adalah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud yang repetitif—atau sebuah pola berulang—yang ditentukan oleh sifat asli manusia.²¹ Hal ini kemudian memberikan asumsi bahwa manusia itu egois dan menginginkan kekuasaan. Sama halnya negara, karena negara digerakkan oleh manusia.

Pada akhirnya, baik atau buruk, dan salah atau benar, adalah relatif. George Kennan (1985) mengklaim bahwa perhatian utama dari kepentingan nasional adalah masalah 'kebutuhan yang tidak dapat dihindari', bukan subjek yang "baik" atau "buruk". Jika kepentingan nasional adalah sesuatu yang sangat penting, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menilai perilaku politik internasional suatu aktor, karena yang etis di sini adalah kepentingan, bukan paksaan.²² Untuk itu, teori

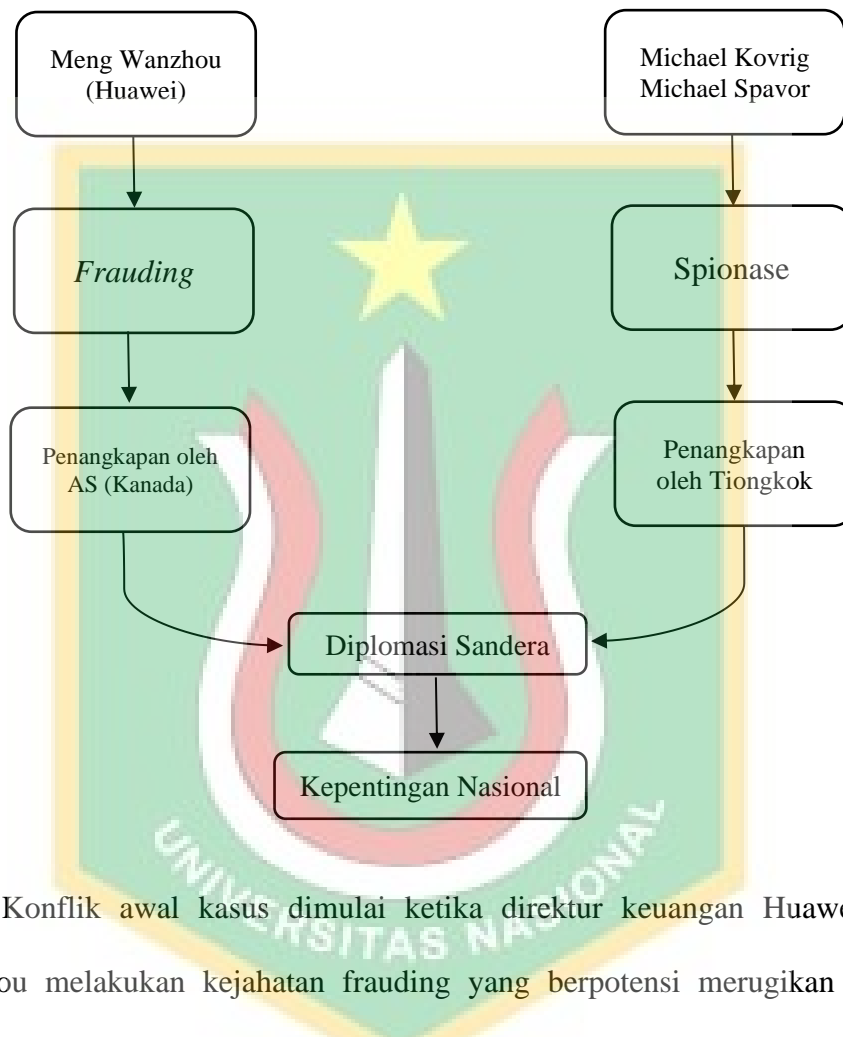
²⁰ *Ibid*, hal. 49-50.

²¹ Sandrina Antunes dan Isabel Camisão. *Op. Cit*, hal. 12

²² Jack Donnelly. *Op. Cit*, hal. 50.

ini digunakan untuk menganalisis konflik kepentingan dari tiga aktor negara yang terlibat dan alasan dibalik tindakan mereka dalam kasus ini.

2.3 Kerangka Pemikiran



Konflik awal kasus dimulai ketika direktur keuangan Huawei, Meng Wanzhou melakukan kejahatan *frauding* yang berpotensi merugikan Amerika Serikat. Akibatnya, AS meminta Kanada melakukan penangkapan terhadap Meng Wanzhou ketika ia mendarat di Vancouver. Berkaitan dengan kasus ini, Two Michaels yang dicurigai melakukan spionase oleh Pemerintah Tiongkok juga ikut ditangkap di Tiongkok. Keterhubungan antar dua kasus ini mengarah pada pembahasan diplomasi sandera. Sementara, alasan adanya diplomasi sandera adalah karena adanya konflik kepentingan antar aktor yang harus dipenuhi.